KABINET-KABINET
REPUBLIK INDONESIA

//

AN NASIONAL RI
3/57

KEMENTERIAN PENERANGAN R. I.

Rp 250 570

KABINET-KABINET REPUBLIK INDONESIA

24/3-06.

338/Kab/157.

//

KEMENTERIAN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Tanggal :
Item ID : 1011388900
No. Induk : 20110010600 8177
BIB-ID : 0010-52713260
Beli/Hadiah :



ISI :

Hal.

Kata pengantar 5

I. Ichtisar djumlah kementerian-kementerian, djabatan-djabatan dan orang-orang jang mendudukinja dalam masing-masing Kabinet ... 7

II. Ichtisar pembagian tempat dalam Kabinet-kabinet menurut partai 9

III. Ichtisar pembagian pimpinan Kementerian-kementerian dalam Kabinet-kabinet menurut partai 11

IV. Susunan Kabinet-kabinet:

R.I. LAMA:

1. 2 September 1945 — 14 Nopember 1945 (Presiden sendiri) 15
2. 14 Nopember 1945 — 12 Maret 1946 (Sjahrir-I) 16
3. 12 Maret 1946 — 2 Oktober 1946 (Sjahrir-II) 17
4. 2 Oktober 1946 — 3 Djuli 1947 (Sjahrir-III) 19
5. 3 Djuli 1947 — 11 Nopember 1947 (Sjarifuddin-I) 21
6. 11 Nopember 1947 — 29 Djanuari 1948 (Sjarifuddin-II) 23
7. 29 Djanuari 1948 — 4 Agustus 1949 (Hatta-I) 25

7a. 19 Desember 1948 — 13 Djuli 1949 Pemerintah Darurat (Sjafruddin) 27

8. 4 Agustus 1949 — 20 Desember 1949 (Hatta-II) 29
9. 20 Desember 1949 — 21 Djanuari 1950 Kabinet peralihan (Susanto) 31

10a. 21 Djanuari 1950 — 6 September 1950 Halim 32

R.I.S.:

10b. 20 Desember 1949 — 6 September 1950 (Hatta) 33

R.I. (NEGARA KESATUAN):

11. 6 September 1950 — 27 April 1951 (Natsir) 35
12. 27 April 1951 — 3 April 1952 (Sukiman) 37
13. 3 April 1952 — 1 Agustus 1953 (Wilopo) 39
14. 1 Agustus 1953 — 12 Agustus 1955 (Ali Sastroamidjojo) 41
15. 12 Agustus 1955 — — — (Burhanudin Harahap) 42

V. Program-program Kabinet 43

VI. Daftar nama-nama para Menteri 49

KATA PENGANTAR

Seringkali terdjadi pengumuman-pengumuman dari susunan Kabinet-kabinet Republik jang dulu-dulu, jang satu dengan jang lainnja tidak selalu tjotjok bunjinja. Berhubung dengan itu maka pada Kantor ini, jang mempunjai bahan-bahan resmi tentang bentuknja semua Kabinet dulu-dulu itu, timbul pertanjaan apakah tidak sebaiknja disini disusun daftar-daftar jang lengkap mengenai semua Kabinet Republik kita sedjak saat Proklamasi. Tidak sadja jang demikian itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan mengenai susunan, tanggal-tanggal, dsb., akan tetapi ditindjau dari sudut sedjarah memang ada baiknja djika pada saat ini, jaitu 10 tahun setelah Proklamasi dan setelah pernah bekerdja 17 Kabinet diadakan pengumuman mengenai s e m u a Kabinet itu.

Masakan statistis sekedarnja daripada material jang dihimpun itu (lihat tabel I, II dan III) memberi ichtisar jang memudahkan memakai material tadi sebagai landasan pikiran untuk mendapatkan kesan jang terang mengenai apa jang terdjadi. Dan pengetahuan tentang apa jang telah terdjadi dapat meringankan mentjari djalan keluar dari kesulitan-kesulitan dikemudian hari.

Untuk lengkapnja dalam buku ini dimuat pula program masing-masing Kabinet.

Kepada Kementerian Penerangan jang bersedia menerbitkan risalah ini sebagai buku — hal mana membuktikan pengertian atas faedah risalah ini —, saja menjatakan kegembiraan dan terima kasih saja.

Direktur Kabinet Presiden,

Mr. A. K. PRINGGODIGDO.

Djakarta, 29 Agustus 1955.

I. Ichtisar djumlah kementerian-kementerian, djabatan-djabatan dan orang-orang jang mendudukinja dalam masing-masing Kabinet.

Kab. No.	Dari	Sampai	Djumlah [1]		
			Kementerian	Djabatan	Orang
1	2 September 1945	14 Nopember 1945	12 (12)	19 (18)	18 (17)
2	14 Nopember 1945	12 Maret 1946	12 (12)	16 (16)	13 (14)
3	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	14 (13)	25 (23)	24 (22)
4	2 Oktober 1946	3 Djuli 1947	13 (13)	31 (32)	30 (31)
5	3 Djuli 1947	11 Nopember 1947	14 (14)	34 (33)	31 (31)
6	11 Nopember 1947	29 Djanuari 1948	14 (14)	37 (32)	35 (30)
7	29 Djanuari 1948	4 Agustus 1949	15 (15)	17 (15)	15 (15)
7a	19 Desember 1948	13 Djuli 1949	Kabinet darurat		
8	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	14 (14)	19 (18)	17 (16)
9	20 Desember 1949	21 Djanuari 1950	Kabinet peralihan		
10	21 Djanuari 1950	6 September 1950	13 (13)	15 (15)	15 (15)
10a	20 Desember 1949	6 September 1950	13 (13)	17 (15)	16 (14)
11	6 September 1950	27 April 1951	15 (15)	18 (17)	18 (16)
12	27 April 1951	3 April 1952	15 (15)	19 (19)	18 (19)
13	3 April 1952	1 Agustus 1953	15 (15)	18 (17)	17 (16)
14	1 Agustus 1953	12 Agustus 1955	15 (17)	20 (19)	19 (18)
15	12 Agustus 1955	—	16 (16)[2]	23 (23)[2]	22 (22)[2]

[1] Djumlah-djumlah ini menjatakan djumlah waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan djumlah waktu Kabinet berhenti (dikurung)

[2] Djumlah-djumlah jang dikurung ini menjatakan djumlah pada saat sekarang.

IENURUT PARTAI.

net 8	Kabinet ke 10a		Kabinet ke 10b	
lah	Djumlah		Djumlah	
or.	djab.	or.	djab.	or.
4 (4)	3 (3)	3 (3)	4 (3)	4 (3)
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
1 (1)	—	—	—	—
1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
4 (4)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (3)
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	3 (3)	3 (3)	—	—
—	1 (1)	1 (1)	—	—
—	1 (1)	1 (1)	—	—
1 (1)	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
5 (4)	2 (2)	2 (2)	9 (8)	8 (7)

permulaan P.I.R. hanja memegang 1 djabatan
5 orang. Pada pengangkatan Menteri Urus
embali hanja memegang 2 djabatan dengan 2

I.

	Kabinet ke 10b		Kabinet ke 11		Kabinet ke 12		Kabinet ke 13		Kabinet ke 14		Kabinet ke 15	
	Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah	
	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.
	4 (3)	4 (3)	4 (5)	4 (4)	6(5)*)	5(5)*)	4 (4)	4 (4)	—	—	4 (4)	3 (3)
	—	—	—	—	—	—	—	—	3 (3)	3 (3)	2 (2)	2 (2)
	—	—	1 (0)	1 (0)	—	—	1 (0)	1 (0)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
	—	—	—	—	—	—	—	—	0 (1)	0 (1)	—	—
	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	1 (1)	1 (1)
	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	1 (1)	1 (1)
	3 (3)	3 (3)	—	—	5 (5)	5 (5)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (2)	1 (2)	2 (2)	2 (2)
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	2 (2)	2 (2)	1(2)*)	1(2)*)	—	—	3 (1)	3 (1)	3 (3)	3 (3)
	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	—	—	—	—	—	—	—	—	2 (2)	1 (1)	—	—
	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	2 (2)	2 (2)	—	—	2 (2)	2 (2)	—	—	2 (2)	2 (2)
	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (0)	1 (0)	—	—
	9 (8)	8 (7)	5 (4)	5 (4)	2 (2)	2 (2)	3(2)**)	3 (2)	1 (1)	1 (1)	—	—

emegang 1 djabatan dengan 1 orang dan
katan Menteri Urusan Agraria tanggal
2 djabatan dengan 2 orang. Djadi waktu

D

No.	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	

1) I
2) I
3) I
4) T
5) I
*) A

1. PRESIDENTIEEL KABINET.

2 September 1945 — 14 Nopember 1945.

Djumlah kementerian 12 (12), djumlah djabatan 19 (18), djumlah orang 18 (17). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Menteri Luar Negeri	Mr. A. Subardjo	[5]
2.	Menteri Dalam Negeri	Wiranatakusumah	
3.	Wk. Menteri Dalam Negeri	Mr. Harmani	
4.	Menteri Keamanan Rakjat (a.i.)	Sulyodikusumo [1]	
5.	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Supomo	
6.	Menteri Penerangan	Mr. Amir Sjarifuddin	
7.	Wk. Menteri Penerangan	Mr. Ali Sastroamidjojo	
8.	Menteri Keuangan	Dr. Samsi [2]	
9.	Menteri Kemakmuran	Ir. Surachman Tjokroadisurjo	
10.	Menteri Perhubungan a.i.	Abikusno Tjokrosujoso	
11.	Menteri Pekerdjaan Umum	Abikusno Tjokrosujoso	
12.	Menteri Sosial	Mr. Iwa Kusumasumantri	
13.	Menteri Pengadjaran	Ki Hadjar Dewantara	
14.	Menteri Kesehatan	Dr. Buntaran Martoatmodjo	
15.	Menteri Negara	Dr. Amir	
16.	Menteri Negara	Wachid Hasjim	
17.	Menteri Negara	Mr. Sartono	
18.	Menteri Negara [3]	Mr. A. A. Maramis [4]	
19.	Menteri Negara	Oto Iskandar Dinata	

1) Pada Kabinet ini tidak ada Menteri Keamanan Rakjat, karena Saudara Supriadi jang tg. 6 Oktober 1945 diangkat mendjadi Menteri Keamanan tak pernah melakukan dan tak pernah menjatakan menerima pengangkatan tersebut. Lalu pada tg. 20 Oktober 1945 Sdr. Sulyodikusumo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakjat ad interim.

2) Berhenti tanggal 25 September 1945; diganti Mr. A. A. Maramis.

3) Djabatan ini ditiadakan (tidak diisi) bersama-sama pengangkatan Mr. A. A. Maramis sebagai Menteri Keuangan.

4) Tanggal 25 September 1945 mendjabat Menteri Keuangan.

5) Partai-partai politik waktu itu belum dibentuk lagi.

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

2. KABINET SJAHRIR ke-I.

14 Nopember 1945 — 12 Maret 1946.

Djumlah kementerian 12 (12), djumlah djabatan 16 (16), djumlah orang 13 (14). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
2.	Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
3.	Menteri Dalam Negeri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
4.	Wk. Menteri Dalam Negeri	Mr. Harmani	—
5.	Menteri Keamanan Rakjat	Mr. A. Sjarifuddin	P. Sosialis
6.	Wk. Menteri Keamanan Rakjat	Abdul Murad [1]	P. Sosialis
7.	Menteri Kehakiman	Mr. Suwandi	—
8.	Menteri Penerangan	Mr. A. Sjarifuddin [2]	P. Sosialis
9.	Menteri Keuangan	Mr. Sunarjo Kolopaking [3]	—
10.	Menteri Kemakmuran	Ir. Darmawan Mangunkusumo	—
11.	Menteri Perhubungan	Ir. Abdulkarim	—
12.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Putuhena	Parkindo
13.	Menteri Sosial	Dr. Adjidarmo Tjokronegoro [4]	P. Sosialis
14.	Menteri Pengadjaran	Dr. Mr. T.S.G. Mulia	Parkindo
15.	Menteri Kesehatan	Dr. Darma Setiawan	—
16.	Menteri Negara	H. Rasjidi	Masjumi

[1] Pada bulan Djanuari 1946 Saudara S. Josodiningrat (tidak berpartai) diangkat mendjadi Menteri Muda Keamanan Rakjat (sebagai pengganti Abdul Murad jang tidak lagi melakukan tugasnja).

[2] Pada tanggal 3 Djanuari 1946 diganti Mohd. Natsir (Masjumi).

[3] Pada tanggal 5 Desember 1945 diganti oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo (tidak berpartai).

[4] Pada tanggal 5 Desember 1945 Dr. Adjidarmo Tjokronegoro diganti oleh Dr. Soedarsono (Partai Sosialis).

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu dibentuk Kabinet (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

3. KABINET SJAHRIR ke-II. [1])

12 Maret 1946 — 2 Oktober 1946.

Djumlah kementerian 14 (13), djumlah djabatan 25 (23), djumlah orang 24 (22) *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
2.	Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
3.	Menteri Muda Luar Negeri	H. Agus Salim	—
4.	Menteri Dalam Negeri	Dr. Sudarsono	P. Sosialis
5.	Menteri Pertahanan	Mr. A. Sjarifuddin	P. Sosialis
6.	Menteri Muda Pertahanan	Arudji Kartawinata	Masjumi
7.	Menteri Kehakiman	Mr. Suwandi [2])	—
8.	Menteri Muda Kehakiman	Mr. Hadi	—
9.	Menteri Penerangan	Mohd. Natsir	Masjumi
10.	Menteri Keuangan	Ir. Surachman	—
11.	Menteri Muda Keuangan	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Masjumi
12.	Menteri Pertanian dan Persediaan [3])	Ir. Rasad [4])	—

---

1) Pada Kabinet ini diangkat sebagai Menteri Muda Dalam Negeri Samadikun, sebagai Menteri Muda Perdagangan dan Perindustrian Sjamsu Haria Udaja dan sebagai Menteri Pengadjaran Mohd. Sjafei, akan tetapi mereka ini ketiga-tiganja tidak menerima pengangkatannja. Maklumat Presiden 1946 No. 1 dan 2 menetapkan bahwa tg. 29 Djuni — 2 Oktober 1946 Presiden mengambil kekuasaan Pemerintah sepenuh-penuhnja.

2) Berhenti tanggal 22 Djuni 1946.

3) Kementerian ini digabungkan lagi dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian mendjadi satu, jaitu Kementerian Kemakmuran pada tanggal 26 Djuni 1946 (Penetapan Pemerintah 1946 No. 10/SD).

4) Pada tanggal 26 Djuni 1946 berhenti karena Kem. Pertanian dan Perdagangan dikumpulkan lagi mendjadi Kementerian Kemakmuran dibawah pimpinan Ir. Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri dan Ir. Saksono sebagai Menteri Muda.

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	Nama	Partai
13.	Menteri Muda Pertanian dan Persediaan	Ir. Saksono	P. Sosialis
14.	Menteri Perdagangan dan Perindustrian 1)	Ir. Darmawan Mangunkusumo	—
15.	Menteri Perhubungan	Ir. Abdulkarim	—
16.	Menteri Muda Perhubungan	Ir. Djuanda	—
17.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Putuhena	Parkindo
18.	Menteri Muda Pekerdjaan Umum	Ir. H. Laoh	P.N.I.
19.	Menteri Sosial	Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso	Perwari dan PPI.
20.	Menteri Muda Sosial	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat	P. Sosialis
21.	Menteri Muda Pengadjaran	Dr. Mr. T.S.G. Mulia	Parkindo
22.	Menteri Agama	H. Rasjidi	Masjumi
23.	Menteri Kesehatan	Dr. Darma Setiawan	—
24.	Menteri Muda Kesehatan	Dr. Leimena	Parkindo
25.	Menteri Negara	Wikana	Badan Kongres Pemuda

1) Kementerian-kementerian ini digabungkan lagi dengan Kementerian Pertanian dan Perusahaan mendjadi satu, jaitu Kementerian Kemakmuran pada tanggal 26 Djuni 1946 (Penetapan Pemerintah 1946 No. 10/SD.)

4. KABINET SJAHRIR ke-III.

2 Oktober 1946 — 3 Djuli 1947 [1]).

Djumlah kementerian 13 (13), djumlah djabatan 30 (31) djumlah orang 31 (32). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
2.	Menteri Luar Negeri	Sutan Sjahrir	P. Sosialis
3.	Menteri Muda Luar Negeri	H. Agus Salim	—
4.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Mohd. Rum	Masjumi
5.	Menteri Muda Dalam Negeri	Wijono	B.T.I.
6.	Menteri Pertahanan	Mr. A. Sjarifuddin	P. Sosialis
7.	Menteri Muda Pertahanan	Harsono Tjokroaminoto	Masjumi
8.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
9.	Menteri Muda Kehakiman	Mr. Hadi	—
10.	Menteri Penerangan	Mohd. Natsir	Masjumi
11.	Menteri Muda Penerangan	A.R. Baswedan	—
12.	Menteri Keuangan	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Masjumi
13.	Menteri Muda Keuangan	Mr. Lukman Hakim	P.N.I.
14.	Menteri Kemakmuran	Dr. A.K. Gani	P.N.I.
15.	Menteri Muda Kemakmuran	Mr. Jusuf Wibisono	Masjumi
16.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	—
17.	Menteri Muda Perhubungan	Setiadjid	P.B.I.
18.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. Putuhena	Parkindo
19.	Menteri Muda Pekerdjaan Umum	Ir. H. Laoh	P.N.I.
20.	Menteri Sosial	Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso	Perwari dan P.P.I.
21.	Menteri Muda Sosial	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat	P. Sosialis
22.	Menteri Pengadjaran	Mr. Suwandi	—
23.	Menteri Muda Pengadjaran	Ir. Gunarso	—

1) Maklumat Presiden 1947 No. 6 tanggal 27 Djuni 1947 menetapkan bahwa Presiden sedjak 27 Djuni 1947 memegang kekuasaan sepenuh-penuhnja.

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	Nama	Partai
24.	Menteri Agama	Faturrachman	Masjumi
25.	Menteri Kesehatan	Dr. Darma Setiawan	—
26.	Menteri Muda Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
27.	Menteri Negara	Hamengku Buwono IX	—
28.	Menteri Negara	Wachid Hasjim	Masjumi
29.	Menteri Negara	Wikana	B.K. Pemuda
30.	Menteri Negara	Dr. Sudarsono	P. Sosialis
31.	Menteri Negara	Mr. Tan Po Gwan	P. Sosialis
32.	Menteri Negara [1]	Dr. D.D. Setyabuddhy [2]	—

1) Djabatan ini diadakan bersama-sama pengangkatan Dr. D.D. Setyabuddhy mendjadi Menteri Negara.

2) Diangkat pada tanggal 27 April 1947 (Keputusan Presiden tanggal 27 April 1947 No. 23 — A — 47).

5. KABINET AMIR SJARIFUDDIN ke-I [1])

3 Djuli 1947 — 11 Nopember 1947.
Djumlah Kementerian 14 (14), djumlah djabatan 33 (33), djumlah orang 31 (31). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Mr. Amir Sjairfuddin	P. Sosialis
2.	Wk. Perdana Menteri	Dr. A. K. Gani	P.N.I.
3.	Wk. Perdana Menteri	Setiadjid	P.B.I.
4.	Menteri Luar Negeri	H. A. Salim	—
5.	Menteri Muda Luar Negeri	Mr. Tamzil	P. Sosialis
6.	Menteri Dalam Negeri	Wondoamiseno	P.S.I.I.
7.	Menteri Muda Dalam Negeri	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat	P. Sosialis
8.	Menteri Pertahanan	Mr. A. Sjarifuddin	P. Sosialis
9.	Menteri Muda Pertahanan	Arudji Kartawinata	P.S.I.I.
10.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
11.	Menteri Penerangan	Ir. Setiadi	P. Sosialis
12.	Menteri Muda Penerangan	Sjahbuddin Latif	P.S.I.I.
13.	Menteri Keuangan	Mr. A. A. Maramis	P.N.I.
14.	Menteri Muda Keuangan	Dr. Ong Eng Die	—
15.	Menteri Kemakmuran	Dr. A. K. Gani	P.N.I.
16.	Menteri Muda I Kemakmuran	I. J. Kasimo	P.K.R.I.

[1]) Maklumat Presiden 1947 No. 7 tanggal 3 Djuli 1947.
Dalam Kabinet ini diminta duduk pula sebagai Menteri Muda II Pertahanan Sdr. Kartosuwirjo dan sebagai Menteri Muda Pengadjaran Sdr. Surowijono, akan tetapi mereka ini kedua-duanja tidak sanggup duduk dalam Kabinet, sehingga tidak diangkat.

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	Nama	Partai
17.	Menteri Muda II Kemakmuran	Dr. A. Tjokronegoro	P. Sosialis
18.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	—
19.	Menteri Pekerdjaan Umum.	Mohd. Enoch 2)	—
20.	Menteri Muda Pekerdjaan Umum 1)	Ir. H. Laoh 2)	P.N.I.
21.	Menteri Perburuhan	Nj. S. K. Trimurty	P.B.I.
22.	Menteri Muda Perburuhan	Mr. Wilopo	P.N.I.
23.	Menteri Sosial	Suprodjo	P.B.I.
24.	Menteri Muda Sosial	Sukoso Wirjosaputro	P.S.I.I.
25.	Menteri Pengadjaran	Mr. Ali Sastroamidjojo	P.N.I.
26.	Menteri Agama	— 3)	—
27.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
28.	Menteri Muda Kesehatan	Dr. Satrio	P.B.I.
29.	Menteri Negara	Sultan Hamengku Buwono IX	—
30.	Menteri Negara	Wikana	B.K. Pemuda
31.	Menteri Negara	Sujas	B.T.I.
32.	Menteri Negara	Siauw Giok Tjhan	—
33.	Menteri Negara	Mr. Hindromartono	P. Sosialis
34.	Menteri Negara	Drs. Maruto Darusman	P.K.I.

1) Djabatan ini ditiadakan (tidak diisi) bersama-sama pengangkatan Ir. H. Laoh mendjadi Menteri Pekerdjaan Umum.
2) Moh. Enoch 11 Agustus 1947 berhenti dan diganti oleh Ir. H. Laoh.
3) Karena K. Achmad Asj'ari (P.S.I.I.) jang diangkat sebagai Menteri Agama tidak bisa datang dari Sumatera dan tidak bisa memangku djabatannja maka *Hadji Anwaruddin dari P.S.I.I.* diangkat sebagai Menteri Agama ad interim pada tanggal 9 Oktober 1947.

6. KABINET AMIR SJARIFUDDIN ke-II

Sesudah reshuffling pada tanggal 11 Nopember 1947 — 29 Djanuari 1948 [1]).

Djumlah kementerian 14 (14), djumlah djabatan 37 (32). djumlah orang 35 (30). *)

No.	Djabatan **)	Nama	Partai
1.	*Perdana Menteri*	Mr. A. Sjarifuddin	P. Sosialis
2.	Menteri Keuangan	Mr. A. A. Maramis	P.N.I.
3.	Menteri Muda Keuangan	Dr. Ong Eng Die	—
4.	Menteri Pertahanan	Mr. A. Sjarifuddin	P. Sosialis
5.	Menteri Muda Pertahanan	Arudji Kartawinata	P.S.I.I.
6.	*Wk. Perdana Menteri I* [2])	Mr. Samsuddin [2])	Masjumi
7.	Menteri Luar Negeri	H. Agus Salim	—
8.	Menteri Muda Luar Negeri	Mr. Tamzil	P. Sosialis
9.	Menteri Penerangan	Sjahbuddin Latif	P.S.I.I.
10.	Menteri Muda Penerangan	Ir. Setiadi	P. Sosialis
11.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
12.	Menteri Muda Kehakiman	Mr. Kasman Singodimedjo [2])	Masjumi
13.	Menteri Pengadjaran	Mr. Ali Sastroamidjojo	P.N.I.
14.	*Wk. Perdana Menteri II*	Wondoamiseno	P.S.I.I.
15.	Menteri Dalam Negeri [2])	Mr. Mohd. Roem [2])	Masjumi
16.	Menteri Muda Dalam Negeri	Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat	P. Sosialis
17.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
18.	Menteri Muda Kesehatan	Dr. Satrio	P.B.I.
19.	Menteri Sosial	Suprodjo	P.B.I.

1) Kabinet ini berhenti pada tanggal 23 Djanuri 1948 (Maklumat Presiden 1948 No. 2) tetapi meneruskan pekerdjaannja sampai tanggal 29 Djanuari 1948, tanggal pembentukan Presidentieel Kabinet dalam Maklumat Presiden tahun 1948 No. 3.

2) Pada tanggal 22 Djanuari 1948 lima Menteri dari partai Masjumi keluar dari Kabinet (Maklumat Presiden 1948 No. 1 tanggal 22 Djanuari 1948). Hingga Kabinet bubar djabatan-djabatan mereka ini tidak diisi, sehingga djumlah-djabatan mendjadi kurang lima pula.

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

**) Perdana Menteri dan para Wakil Perdana Menteri disebutkan diatas para Menteri jang pekerdjaannja diamat-amatinja.

No.	Djabatan **)	Nama	Partai
20.	Menteri Muda Sosial	Sukoso Wirjosaputro	P.S.I.I.
21.	Menteri Agama 1)	Kiaji Hadji Masjkur 1)	Masjumi
22.	*Wk. Perdana Menteri III*	Setiadjid	P.B.I.
23.	Menteri Kemakmuran	Dr. A. K. Gani	P.N.I.
24.	Menteri Muda I Kemakmuran	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
25.	Menteri Muda II Kemakmuran	Dr. A. Tjokronegoro	P. Sosialis
26.	Menteri Perburuhan	Nj. S. K. Trimurt.	P.B.I.
27.	Menteri Muda Perburuhan	Mr. Wilopo	P.N.I.
28.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	—
29.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. H. Laoh	P.N.I.
30.	*Wk. Perdana Menteri IV*	Dr. A. K. Gani	P.N.I.
31.	Menteri Negara	Hamengku Buwono IX	—
32.	Menteri Negara Urusan Pemuda	Wikana	B.K. Pemuda
33.	Menteri Negara Urusan Makanan	Sujas	B.T.I.
34.	Menteri Negara Urusan Peranakan	Siauw Giok Tjhan	—
35.	Menteri Negara Urusan Kepolisian.	Mr. Hindromartono	P. Sosialis
36.	Menteri Negara	Drs. Maruto Darusman	P.K.I.
37.	Menteri Negara 1)	Anwar Tjokroaminoto 1)	Masjumi

**) Perdana Menteri dan para Wakil Perdana Menteri disebutkan diatas para Menteri jang pekerdjaannja diamat-amatinja.

1) Pada tanggal 22 Djanuari 1948 lima Menteri dari partai Masjumi keluardari Kabinet (Maklumat Presiden 1948 No. 1 tanggal 22 Djanuari 1948). Hingga Kabinet bubar djabatan-djabatan mereka ini tidak diisi, sehingga djumlah djabatan mendjadi kurang lima pula.

7. KABINET HATTA ke-I (PRESIDENTIEEL KABINET).

mulai 29 Djanuari 1948 — 4 Agustus 1949. [1])

Djumlah kementerian 15 (15), djumlah djabatan 17 (15) orang 15 (15). *)

No.	Djabatan	Nama	Partai
1.	Wakil Presiden, Pemimpin Kabinet sehari-hari	Drs. Mohammad Hatta	—
2.	Menteri Luar Negeri	Hadji Agus Salim	—
3.	Menteri Dalam Negeri ad interim	Dr. Sukiman	Masjumi
4.	Menteri Pertahanan ad interim	Drs. Mohammad Hatta [2])	—
5.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
6.	Menteri Penerangan	Mohammad Natsir	Masjumi
7.	Menteri Keuangan	Mr. A. A. Maramis [3])	P.N.I.
8.	Menteri Persediaan Makanan Rakjat	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
9.	Menteri Kemakmuran	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Masjumi
10.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	—
11.	Menteri Pekerdjaan Umum ad interim	Ir. Djuanda [4])	—
12.	Menteri Perburuhan dan Sosial	Kusnan	P.G.R.I.

1) Dibentuk dengan Maklumat Presiden tahun 1948 No. 3.
Pada tanggal 4 Agustus 1949 (setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali lagi di Jogjakarta) Kabinet ini mendapat perobahan. 15 September — 15 Desember 1948 Presiden mendapat kekuasaan penuh (U.U. 1948 No. 30).

2) Sampai 15 Djuli 1949.

3) Setelah Mr. Maramis berangkat ke Luar Negeri, djabatannja dilakukan ad interim oleh Drs. Mohammad Hatta.

4) Pada tanggal 13-4-1948 Ir. Djuanda diperhentikan sebagai Menteri Pekerdjaan Umum ad interim dan Ir. H. Laoh dari P.N.I. diangkat sebagai Menteri Pekerdjaan Umum (Keputusan Presiden tanggal 13-4-1948 No. 40/A.CIV./48).

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

KANTOR PERPUSTAKAAN NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P. & K.

No.	Djabatan	Nama	Partai
13.	Menteri Pembangunan dan Pemuda	Supeno 1) (meninggal dunia selama aksi Militer Belanda ke-2 tanggal 24 Pebruari 1949)	P.S.I.
14.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Mr. Ali Sastroamidjojo	P.N.I.
15.	Menteri Agama	K. H. Masjkur	Masjumi
16.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
17.	Menteri Negara 2)	Hamengku Buwono IX 2)	—

1) Berhubung dengan meninggalnja Sdr. Supeno dan karena djabatan itu tidak diisi, maka djumlah djabatan mendjadi kurang satu.

2) Pada tanggal 15 Djuli 1949 Hamengkubuwono IX diangkat mendjadi Menteri Pertahanan (Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949); sebelumnja telah bertugas Koordinator Keamanan dalam negeri. Karena djabatan Menteri Negara tidak diisi lagi, maka djumlah djabatan mendjadi kurang satu lagi.

7a. KABINET DARURAT.

19 Desember 1948 — 13 Djuli 1949

1. Mr. Sjafruddin Prawiranegara	—	Ketua, merangkap Pertahanan, Penerangan dan mewakili urusan Luar Negeri.
2. Mr. A. A. Maramis	—	Menteri Luar Negeri.
3. Mr. Teuku Mohd. Hasan	—	Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan, mewakili urusan Dalam Negeri dan Agama.
4. Mr. Lukman Hakim	—	Keuangan dan mewakili Kehakiman.
5. Mr. Sutan Rasjid	—	Perburuhan dan Sosial, Pembangunan dan Pemuda, serta Keamanan.
6. Ir. Sitompul	—	Pekerdjaan Umum dan mewakili Kesehatan
7. Ir. Indratjaja	—	Perhubungan, dan mewakili Kemakmuran.

Pada tanggal 16 Mei 1949 oleh Pemerintah Darurat dibentuklah Komisariat P.D.R.I. di Djawa, jang terdiri dari:

1. Menteri Kehakiman	:	Mr. Susanto Tirtoprodjo
2. Menteri P.M.R.	:	I. J. Kasimo
3. Menteri Agama	:	K. H. Masjkur, dan
4. untuk urusan Dalam Negeri	:	Suroso.

---

8. KABINET HATTA ke-II
(PRESIDENTIEEL KABINET)

sesudah Kabinet Hatta mendapat perobahan susunannja pada 4 Agustus 1949 — 20 Desember 1949. [1])

Djumlah Kementerian 14 (14), djumlah djabatan 19 (18), djumlah orang 17 (16) *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Wakil Presiden Mohd. Hatta [2])	—
2	Wakil Perdana Menteri	Mr. Sjafruddin Prawira-negara [3])	Masjumi
3.	Menteri Luar Negeri	Hadji Agus Salim	—
4.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Wongsonegoro	P.I.R.
5.	Menteri Pertahanan, Koordinator Keamanan Dalam Negeri	Hamengku Buwono IX [4])	—
6.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
7.	Menteri Penerangan	Mr. Samsuddin	Masjumi
8.	Menteri Keuangan	Mr. Lukman Hakim	P.N.I.
9.	Menteri Persediaan Makanan Rakjat	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
10.	Menteri Kemakmuran	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
11.	Menteri Perhubungan	Ir. H. Laoh	P.N.I.
12.	Menteri Pekerdjaan Umum	Ir. H. Laoh	P.N.I.
13.	Menteri Perburuhan dan Sosial	Kusnan	P.G.R.I.
14.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	S. Mangunsarkoro	P.N.I.
15.	Menteri Agama	K. H. Masjkur	Masjumi

1) Penetapan Presiden 1949 No. 6 tanggal 4 Agustus 1949.
2) Mendjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia ke K.M.B.
3) Berkedudukan di Kotaradja.
4) Mendjabat a c t i n g P e r d a n a M e n t e r i setelah Drs. Mohd. Hatta berangkat ke Konperensi Medja Bundar.
*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	Nama	Partai
16.	Menteri Kesehatan ad interim	Dr. Surono 1)	—
17.	Menteri Negara	Dr. Sukiman Wirjosandjojo 2)	Masjumi
18.	Menteri Negara	Ir. Djuanda 2)	—
19.	Menteri Negara 1)	Dr. J. Leimena 2)	Parkindo

1) Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1949 Dr. Surono diperhentikan sebagai Menteri Kesehatan ad interim dan Dr. J. Leimena diangkat mendjadi Menteri Kesehatan (Penetapan Presiden No. 30 tahun 1949). Karena djabatan Menteri Negara tidak diisi, maka djumlah djabatan mendjadi kurang satu.

2) Anggauta Delegasi Republik Indonesia ke K.M.B.

9. KABINET SUSANTO
(KABINET PERALIHAN) [1])

tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Djanuari 1950.
Djumlah Kementerian 12, djumlah djabatan 13, djumlah orang 7.

No.	Djabatan	Nama	Partai
1.	Acting Perdana Menteri	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
2.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
3.	Menteri Kehakiman	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
4.	Menteri Penerangan	Mr. Samsuddin	Masjumi
5.	Menteri Keuangan	Mr. Lukman Hakim	P.N.I.
6.	Menteri Persediaan Makanan Rakjat	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
7.	Menteri Kemakmuran	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
8.	Menteri Perhubungan	—	—
9.	Menteri Pekerdjaan Umum	—	—
10.	Menteri Perburuhan dan Sosial	Kusnan	P.G.R.I.
11.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	S. Mangunsarkoro	P.N.I.
12.	Menteri Agama	K. H. Masjkur	Masjumi
13.	Menteri Kesehatan	—	—

1) Kabinet ini mulai bekerdja setelah Drs. Mohd. Hatta serta beberapa Menteri lainnja mendjadi Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat, jaitu pada tanggal 20 Desember 1949 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1949) dan bertindak sampai Kabinet Halim dibentuk, jaitu pada tanggal 21 Djanuari 1950 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1950).

10a. KABINET HALIM
(REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA). [1])
21 Djanuari 1950 sampai 6 September 1950.

Djumlah Kementerian 13 (13), djumlah djabatan 15 (15), djumlah orang 15 (15). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Dr. A. Halim	—
2.	Wakil Perdana Menteri, merangkap Urusan Umum	Abdul Hakim	Masjumi
3.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Susanto Tirtoprodjo	P.N.I.
4.	Menteri Kehakiman	Mr. A. G. Pringgodigdo	—
5.	Menteri Penerangan	Wiwoho Purbohadidjojo	Masjumi
6.	Menteri Keuangan	Mr. Lukman Hakim	P.N.I.
7.	Menteri Pertanian	Sadjarwo	B.T.I.
8.	Menteri Perdagangan dan Perindustrian	Mr. Tandiono Manu	P.S.I.
9.	Menteri Pekerdjaan Umum dan Perhubungan	Ir. Sitompul	Parkindo
10	Menteri Perburuhan	Dr. Maäs	P. Buruh
11.	Menteri Sosial	Hamdani	P.S.I.
12.	Menteri Pembangunan Masjarakat	Sugondo Djojopuspito	P.S.I.
13.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	S. Mangunsarkoro	P.N.I.
14.	Menteri Agama	Fakih Usman	Masjumi
15.	Menteri Kesehatan	Dr. Sutopo	P.I.R.

1) Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16, 1950 tanggal 6 Pebruari 1950.
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42, 1950 tanggal 15 Agustus 1950, Kabinet mendjadi demissionair sampai tanggal pembentukan Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia jang terdjadi pada tanggal 6 September 1950 (Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kesatuan) No. 9 tahun 1950).

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

10*b*. KABINET R.I.S.
(PERTAMA DAN TERACHIR)

20 Desember 1949 [1]) — 6 September 1950 [2])

Djumlah Kementerian 13 (13), djumlah djabatan 17 (15), djumlah orang 16 (14). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri, sementara merangkap Menteri Luar Negeri	Drs. Mohammad Hatta	—
2.	Menteri Dalam Negeri	Anak Agung Gde Agung	—
3.	Menteri Pertahanan	Hamengku Buwono IX	—
4.	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Supomo	—
5.	Menteri Penerangan	Arnold Manonutu	P.N.I.
6.	Menteri Keuangan	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Masjumi
7.	Menteri Kemakmuran	Ir. Djuanda	—
8.	Menteri Perburuhan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum	Ir. H. Laoh	P.N.I.
9.	Menteri Perhubungan	Mr. Wilopo	P.N.I.
10.	Menteri Sosial	Mr. Mohd. Kosasih Purwanegara	—
11.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Dr. Abu Hanifah	Masjumi
12.	Menteri Agama	K. H. Wachid Hasjim	Masjumi
13.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo

---

[1]) Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2, 1949 tanggal 20 Desember 1949.

[2]) Demissionair sedjak 15 Agustus 1950 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 241, 1950 tanggal 15 Agustus 1950).

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	Nama	Partai
14.	Menteri Negara 1)	Sultan Hamid II 2)	—
15.	Menteri Negara 3)	Mr. Mohd Rum 4)	Masjumi
16.	Menteri Negara	Dr. Suparmo	—

1) Djabatan ini ditiadakan bersama-sama pemetjatan Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara.

2) Dipetjat atas dasar laporan Djaksa Agung mulai tanggal 5 April 1950 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 144 tahun 1950 tanggal 4 April 1950).

3) Djabatan ini ditiadakan bersama-sama pengangkatan Mr. Mohd. Rum sebagai Komissaris Agung.

4) Mendjadi Komissaris Agung di Den Haag mulai tanggal 19 Djanuari 1950 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950 tanggal 19 Djanuari 1950).

11. KABINET NATSIR
(KABINET REPUBLIK INDONESIA KESATUAN JANG PERTAMA).

6 September 1950 [1]) — 27 April 1951 [2])

Djumlah Kementerian 15 (15), djumlah djabatan 18 (17), djumlah orang 18 (16). *)

No.	Djabatan	Nama	Partai
1.	Perdana Menteri	Mohammad Natsir [3])	Masjumi
2.	Wakil Perdana Menteri	Hamengku Buwono IX	—
3.	Menteri Luar Negeri	Mohammad Rum	Masjumi
4.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Assaät	—
5.	Menteri Pertahanan ad interim	Dr. A. Halim [4])	—
6.	Menteri Kehakiman	Mr. Wongsonegoro	P.I.R.
7.	Menteri Penerangan	M. A. Pellaupessy	Demokrat
8.	Menteri Keuangan	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Masjumi
9.	Menteri Pertanian	Mr. Tandiono Manu	P.S.I.
10.	Menteri Perdagangan dan Perindustrian	Dr. Sumitro Djojohadikusumo	P.S.I.
11.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	—
12.	Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga	Prof. Ir. H. Johannes	P.I.R.

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9, 1950 tanggal 6 September 1950.
2) Demissioner sedjak 21 Maret 1951 (Keputusan Presiden tanggal 21 Maret 1951 No. 43/1951).
3) Sedjak 17 Desember 1950 merangkap Menteri Pertahanan ad interim.
4) Berhenti mulai tanggal 17 Desember 1950 (Keputusan Presiden No. 2a tahun 1951 tanggal 9 Djanuari 1951).
*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	Nama	Partai
13.	Menteri Perburuhan	Suroso	Parindra
14.	Menteri Sosial	Harjadi	P. Katholik
15.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Dr. Bahder Djohan	—
16.	Menteri Agama	K. H. Wachid Hasjim	Masjumi
17.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
18.	Menteri Negara 1)	Harsono Tjokroaminoto 2)	P.S.I.I.

1) Djabatan ini ditiadakan bersama-sama pemberhentian saudara Harsono Tjokroaminoto.

2) Berhenti mulai tanggal 31 Desember 1950 (Keputusan Presiden No. 65 tahun 1950 tanggal 20 Desember 1950).

12. KABINET SUKIMAN
(KABINET REPUBLIK INDONESIA KESATUAN JANG KEDUA).

27 April 1952 [1]) — 3 April 1952 [2])

Djumlah Kementerian 15 (15), djumlah djabatan 19 (19), djumlah orang 18 (19):*)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri	Dr. Sukiman Wirjosandjojo	Masjumi
2.	Wakil Perdana Menteri	Suwirjo	P.N.I.
3.	Menteri Luar Negeri	Mr. Achmad Subardjo	Masjumi
4.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Iskaq Tjokroadisurjo	P.N.I.
5.	Menteri Pertahanan	Sewaka [3])	P.I.R.
6.	Menteri Kehakiman	Mr. Muhammad Yamin [4])	Tidak berpartai
7.	Menteri Penerangan	A. Mononutu	P.N.I.
8.	Menteri Keuangan	Mr. Jusuf Wibisono	Masjumi
9.	Menteri Pertanian	Ir. Suwarto	P.K.R.I.
10.	Menteri Perdagangan dan Perindustrian [5])	Mr. Sujono Hadinoto [6])	P.N.I.

1) Keputusan Presiden No. 80 '51 tanggal 27 April '51.
2) Demissioner sedjak tanggal 23 Pebruari-'52 (Keputusan Presiden Uo. 58, '52 tanggal 25-2-'52). sampai tanggal pembentukan Kabinet Wilopo jang terdjadi pada tanggal 3-4-'52 (Keputusan Presiden No. 85, '52 tanggal 1-4-'52).
3) Sdr. Sewaka (PIR) mulai memangku djabatannja sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 9-5-'51 (Keputusan Presiden No. 82, '51 tanggal 9-5-'51, Keputusan ini djuga menarik kembali pengangkatan Sumitro Kolopaking jang tidak menerima pengangkatannja).
4) Berhenti sebagai Menteri pada tanggal 14-6-'51 (Keputusan Presiden No. 101, '51 tanggal 14-6-'51).
5) Pada tanggal 19-5-'51 diubah mendjadi „Kem. Perekonomian" (Kep. Pres. No. 87, 51 tanggal 19-5-'51).
6) Diberrhentikan dari djabatannja terhitung mulai tanggal 16-7-'51 (Kep. Pres. No. 131-'51 tanggal 19-7-'51) dan diganti oleh Mr. Wilopo jang memangku djabatan ini pada tanggal 16-7-'54 (Kep. Pres. No. 132, '51 tanggal 19-7-'51).
*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada watku Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	N a m a	Partai
11.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	Tidak berpartai
12.	Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga	Ir Ukar Bratakusumah 1)	P.N.I.
13.	Menteri Perburuhan	I. Tedjasukmana	P. Buruh
14.	Menteri Sosial	Dr. Samsuddin	Masjumi
15.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Mr. Wongsonegoro	P.I.R.
16.	Menteri Agama	K. H. Wachid Hasjim	Masjumi
17.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
18.	Menteri Urusan Umum	M. A. Pellaupessy 2) 3)	Demokrat
19.	Menteri Urusan Pegawai	Suroso	Parindra
20.	Menteri Urusan Agraria 4)	Mr. Gondokusumo 5)	P.I.R.

1) Diangkat mendjadi Menteri Perhubungan a.i. tanggal 13-12-'51, disamping djabatannja sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga untuk waktu selama Ir. Djuanda ada di Luar Negeri (Kep. Pres. No. 4, '52 tanggal 8 Djanuari '52).

2) Diangkat sebagai Menteri Kehakiman a.i. terhitung mulai tanggal 14-6-'51 disamping djabatannja sebagai Menteri Urusan Umum (Kep. Pres. No. 103, '51 tanggal 18-6-'51) sampai tanggal 20 Nopember '51 (Kep. Pres No. 229, '51 tanggal 17 Nop. '51).

3) Diganti sebagai Menteri Kehakiman oleh Mr. Muhammad Nasrun jang diangkat sebagai Menteri Kehakiman terhitung mulai tanggal 20 Nop. '51 (Kep. Pres N. 230, '51 tanggal 17-11-'51).

4) Djabatan ini diadakan pada tanggal 20 Nopember-'51 bersama-sama pada waktu pengangkatan Menteri Urusan Agraria.

5) Mulai memangku djabatannja pada tanggal 20 Nopember '51 (Kep. Pres. No. 228, '51 tanggal 17-11-'51). Berhenti dari djapatannja terhitung mulai hari meninggalnja pada tanggal 6-3-'52 (Kep. Pres. No. 83, '52 tanggal 1-4-'52).

13. KABINET WILOPO
(KABINET REPUBLIK INDONESIA KESATUAN JANG KETIGA)

3 April 1952 [1]) — 1 Agustus 1953 [2])

Djumlah Kementerian 15 (15), djumlah djabatan 18 (17), djumlah orang 17 (16). *)

No.	Djabatan	N a m a	Partai
1.	Perdana Menteri [5])	Mr. Wilopo	P.N.I.
2.	Wakil Perdana Menteri	Prawoto Mangkusasmito	Masjumi
3.	Menteri Luar Negeri a.i.	Mr. Wilopo [3])	P.N.I.
4.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Mohammad Rum	Masjumi
5.	Menteri Pertahanan	Hamengku Buwono IX [4])	Tidak berpartai
6.	Menteri Kehakiman	Mr. Lukman Wiriadinata	P.S.I.
7.	Menteri Penerangan	A. Mononutu	P.N.I.
8.	Menteri Keuangan	Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo	P.S.I.
9.	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
10.	Menteri Perekonomian	Mr. Sumanang	P.N.I.
11.	Menteri Perhubungan	Ir. Djuanda	Tidak berpartai
12.	Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga	Ir. Suwarto	P.K.R.I.

1) Mulai berlaku pada tanggal 3 April 1952 (Kep. Pres No. 85 tahun 1952, tanggal 1 April 1952).

2) Demissioner sedjak tanggal 3 Djuni 1953 (Kep. Pres No. 99 tahun 1953 tanggal 3 Djuni 1953) berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo jang terdjadi pada tanggal 1 Agustus 1953 (Kep. Pres No. 132 tahun 1953, tanggal 30 Djuli 1953).

3) Dibebaskan dari djabatannja sebagai Menteri Luar Negeri a.i. pada tanggal 29 April 1952 (Kep. Pres No. 99 tahun 1952, tanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (P.N.I.), jang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Kep. Pres No. 100 tahun 1952 tanggal 28 April 1952).

4) Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Djuni 1953 diperhentikan dengan hormat dari djabatannja (Kep. Pres. No. 20 tahun 1953 tanggal 31 Djanuari 1953).

5) Dengan Kep. Pres No. 21 tahun 1953 tanggal 31 Djanuari 1953 Perdana Menteri terhitung mulai tanggal 2 Djuni 1952 ditundjuk sebagai Menteri Pertahahnan a.i.

*) Angka-angka ini menjatakan djumlah pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada waktu Kabinet bubar (dikurung).

No.	Djabatan	N a m a	Partai
13.	Menteri Perburuhan	I. Tedjasukmana	P. Buruh
14.	Menteri Sosial	Anwar Tjokroaminoto 1)	P.S.I.I.
15.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Prof. Dr. Bahder Djohan	Tidak berpartai
16.	Menteri Agama	K. H. Fakih Usman	Masjumi
17.	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
18.	Menteri Urusan Pegawai 2)	Suroso 3)	Parindra

1) Dengan Kep. Pres No. 74 tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri diperhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953.-

2) Djabatan ini ditiadakan bersama-sama pembebasan Saudara Suroso dari djabatannja sebagai Menteri Urusan Pegawai.

3) Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953 diperhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Kep. Pres No. 75 tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953.

14. KABINET ALI SASTROAMIDJOJO (KABINET REPUBLIK INDONESIA KESATUAN JANG KE EMPAT)

1 Agustus 1953 [1]) — 12 Agustus 1955. [12]).

Djumlah Kementerian 15 (17), djumlah djabatan 20 (19), djumlah orang 19 (18) *)

No.	Djabatan	Nama	Partai
1.	Perdana Menteri	Mr. Ali Sastroamidjojo	P.N.I.
2.	Wakil Perdana Menteri I	Mr. Wongsonegoro 3) 5) (.....) 9)	P.I.R. (.....)
3.	Wakil Perdana Menteri II	Zainul Arifin	N.U.
4.	Menteri Luar Negeri	Mr. Sunario	P.N.I.
5.	Menteri Dalam Negeri	Prof. Mr. Hazairin 6) 8) (Mr. Sunarjo)	P.I.R. (N.U.)
6	Menteri Pertahanan	Mr. Iwa Kusumasumantri[11])	Pers. Progressief
7.	Menteri Kehakiman	Mr. Djody Gondokusumo	P.R.N.
8.	Menteri Penerangan	Dr. F. L. Tobing	S.K.I.
9.	Menteri Keuangan	Dr. Ong Eng Die	P.N.I.
10.	Menteri Pertanian	Sadjarwo	B.T.I.
11.	Menteri Perekonomian	Mr. Iskaq Tjokroadi-surjo 7) (Prof. Ir. Roos-seno)	P.N.I. (P.I.R.)
12.	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso 2) 6) 8) (Dr. A. K. Gani)	P.S.I.I. (P.N.I.)

1) Mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1953 (Kep. Pres. No. 132 tahun 1953, tanggal 30 Djuli 1953).

2) Tanggal 14 September 1953 Sdr. Abikusno meletakkan djabatannja dan ad interim diganti oleh Prof. Ir. Roosseno (Kep. Pres. No. 157 tahun 1953, tanggal 29 September 1953).

3) Tanggal 14 September 1953 Sdr. Sudibjo meletakkan djabatannja dan ad interim diganti oleh Mr. Wongsonegoro (Kep. Pres. No. 157 tahun 1953, tanggal 29 September 1953).

4) Sedjak 12 Oktober 1953 Ir. Roosseno mendjadi Menteri Perhubungan: sebagai Menteri P.U.T. diganti oleh Sdr. Mohammad Hassan (P.S.I.I.). Kep. Pres. No. 172 tahun 1953 tanggal 9 Oktober 1953.

5) Sedjak 12 Oktober 1953 Dr. Tobing melepaskan Kementerian Kesehatan dan diganti oleh Dr. Mohammad Ali alias Dr. Lie Kiat Teng (P.S.I.I.) Kep. Pres. No. 172 tahun 1953, tanggal 9 Oktober 1953.

*) Angka-angka ini menundjukkan keadaan pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada saat Kabinet bubar (dikurung). Nama-nama jang dikurung menundjukkan nama-nama pendjabat pada saat Kabinet bubar; begitupun nama-nama partai jang dikurung menundjukkan nama-nama partai dari pendapat pendjabat pada saat Kabinet bubar.

No.	Djabatan	Nama	Partai
13.	Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga	Prof. Ir. Roosseno 2) 4) 6) (Moh. Hassan)	P.I.R. (P.S.I.I.)
14.	Menteri Perburuhan	S. M. Abidin	Partai Buruh
15.	Menteri Sosial	Suroso	Parindra
16.	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Mr. Muhammad Yamin	Tak berpartai
17.	Menteri Agama	K. H. Masjkur	N.U.
18.	Menteri Kesehatan	Dr. F. L. Tobing a.i. 5) (Dr. Lie Kiat Teng)	S.K.I. (P.S.I.I.)
19.	Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara 10)	Sudibjo 3) 6) 7) (Siradjuddin Abbas)	P.S.I.I. (Perti)
20.	Menteri Urusan Agraria 10)	Mohammad Hanafiah 8) (I. Gusti Gde Rake)	N.U. (P.R.N.)

6) Mulai tanggal 23 Oktober 1954 Mr. Wongsonegoro meletakkan djabatannja sebagai Wk. P.M. I dan Menteri Kesedjahteraan Negara ad interim; Prof. Mr. Hazairin meletakkan djabatan Menteri Dalam Negeri dan Prof. Ir. Roosseno meletakkan djabatannja sebagai Menteri Perhubungan.
Pekerdjaan Wk. P.M. I dan Menteri Perhubungan dilakukan ad interim oleh Mr. Ali Sastroamidjojo sedang pekerdjaan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesedjahteraan Negara dilakukan ad interim oleh Sdr. Zainul Arifin (Kep. Pres. No. 211, tahun 1954, tanggal 25 Oktober 1954).

7) Mulai 8 Nopember 1954 Mr. Iskaq meletakkan djabatannja dan diganti oleh Prof. Ir. Roosseno. Mulai tanggal jang sama Sdr. Zainul Arifin meletakkan djabatannja sebagai Menteri Kesedjahteraan Negara ad interim dan diganti oleh Sdr. Siradjuddin Abbas — PERTI (Kep. Pres. No. 221, tahun 1954, tanggal 6 Nopember 1954).

8) Mulai 19 Nopember 1954 Mr. Ali Sastroamidjojo meletakkan djabatan Menteri Perhubungan ad interim dan diganti oleh Dr. A. K. Gani (P.N.I.); Sdr. Moh. Hanafiah meletakkan djabatannja sebagai Menteri Agraria dan diganti oleh Sdr. I. Gusti Gde Rake (P.R.N.); Sdr. Zainul Arifin meletakkan djabatannja sebagai Menteri Dalam Negeri dan diganti oleh Mr. Sunarjo (N.U.) (Kep. Pres. No. 227, tahun 1954, tanggal 18 Nopember 1954).

9) Setelah Mr. Wongsonegoro meletakkan djabatannja belum ada penggantinja tetap lagi sehingga hanja ada satu Wakil Perdana Menteri.

10) Pada waktu Kabinet dibentuk kedua Menteri ini dipandang sebagai Menteri Negara (tidak dengan kementerian), tapi setelah reshuffle dilakukan, mereka dianggap mempunjai Kementerian sendiri.

11) Atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat mulai tgl. 13 Djuli 1955. (Kep. Pres. No. 111 th. 1955 tg. 13 Djuli 1955).

12) Demissioner sedjak tg. 24 Djuli 1955 (Kep. Pres. No. 122 th. 1955 tg. 24-7-1955).

15. KABINET BURHANUDIN HARAHAP (KABINET REPUBLIK INDONESIA KESATUAN JANG KELIMA).

12 Agustus 1955 [1] .....

Djumlah Kementerian 16 (16), djumlah djabatan 23 (23) djumlah orang 22 (22) *)

No.	Djabatan	Nama	Partai
1.	Perdana Menteri	Mr. Burhanudin Harahap	Masjumi
2.	Wakil Perdana Menteri I	Djanu Ismadi	P.I.R.
3.	Wakil Perdana Menteri II	Harsono Tjokroaminoto	P.S.I.I.
4.	Menteri Luar Negeri	Mr. Ide Anak Agung Gde Agung	Demokrat
5.	Menteri Dalam Negeri	Mr. Sunarjo	N.U.
6.	Menteri Pertahanan	Mr. Burhanudin Harahap	Masjumi
7.	Menteri Kehakiman	Mr. Lukman Wiriadinata	P.S.I.
8.	Menteri Penerangan	Sjamsuddin Sutan Makmur	P.I.R.
9.	Menteri Keuangan	Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo	P.S.I.
10.	Menteri Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
11.	Menteri Perekonomian	I. J. Kasimo	P.K.R.I.
12.	Menteri Perhubungan	F. Laoh	P.R.N.
13.	Menteri Muda Perhubungan	Asrarudin	P. Buruh
14.	Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga	Suroso [2]	Parindra
15.	Menteri Perburuhan	I. Tedjasukmana	P. Buruh
16.	Menteri Sosial	Sudibjo	P.S.I.I.
17	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	Prof. Ir. Suwandi [2]	Parindra
18	Menteri Agama	K.H. Iljas	N.U.
19	Menteri Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
20	Menteri Agraria	Mr. Gunawan	P.R.N.
21	Menteri Negara	Abdul Hakim	Masjumi
22	Menteri Negara	Sutomo alias Bung Tomo	P.R.I.
23	Menteri Negara	Drs. Coomala Noor	P.I.R.

[1] Mulai berlaku pada tg. 12 Agustus 1955 (Keputusan Presiden No. 141 th. 1955, tanggal 11-8-1955).

[2] Sedjak 26 Agustus 1955 (Keputusan Pres. No. 142 th. 1955 tg. 25 Agustus 1955).

*) Angka-angka ini menundjukkan keadaan pada waktu Kabinet dibentuk (tidak dikurung) dan pada saat sekarang (dikurung).

PROGRAM-PROGRAM KABINET.

Kabinet ke-1 (2 September 1945 — 14 Nopember 1945):

Program Kabinet tidak pernah diumumkan.

Kabinet ke-2 (14 Nopember 1945 — 12 Maret 1946):

1. Menjempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan rakjat
2. Mentjapai ko-ordinasi segala tenaga rakjat didalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masjarakat jang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
3. Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakjat, diantaranja dengan djalan pembagian makanan.
4. Berusaha mempertjepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.

Kabinet ke-3 (12 Maret 1946 — 2 Oktober 1946):

1. Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia Merdeka (100%).
2. Mempersiapkan rakjat Negara disegala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
3. Menjusun Pemerintahan Pusat dan Daerah jang demokratis.
4. Berusaha segiat-giatnja untuk menjempurnakan pembagian makanan dan pakaian.
5. Tentang perusahaan dan perkebunan hendaknja oleh Pemerintah diambil tindakan-tindakan seperlunja hingga memenuhi maksud sebagai termaktub dalam Undang-undang Dasar fatsal 33.

Kabinet ke-4 (2 Oktober 1946 — 3 Djuli 1947):

Serupa dengan program Kabinet ke-3.

Kabinet ke-5 (3 Djuli 1947 — 11 Nopember 1947):

Program Kabinet ini jang tegas tidak pernah diumumkan.

Segala usaha dan kebidjaksaan Pemerintah tidak djauh bedanja dengan Kabinet-kabinet jang lalu.

Kabinet ke-6 (11 Nopember 1947 — 29 Djanuari 1948):

Program Kabinet tidak pernah diumumkan.

Kabinet ke-7 (29 Djanuari 1948 — 4 Agustus 1949):

1. Berunding atas dasar „Renville".
2. Melekaskan terbentuknja Negara Indonesia Serikat.
3. Rasionalisasi.
4. Pembangunan.

Kabinet ke-7a (19 Desember 1948 — 13 Djuli 1949):

Program Kabinet-darurat ini tidak pernah diumumkan.

Kabinet ke-8 (4 Agustus 1949 — 20 Desember 1949):

Program Kabinet ini tidak diumumkan. Usaha-usaha dan kebidjaksanaan Pemerintah digerakkan sesuai dengan kepentingan Negara menurut suasana ketika itu.

Kabinet ke-9 (20 Desember 1949 — 21 Djanuari 1950):

Program Kabinet-peralihan ini tidak diumumkan.

Kabinet ke-10a (21 Djanuari 1950 — 6 September 1950):

1. Meneruskan perdjuangan untuk mentjapai negara kesatuan jang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan jang dimaksud dalam proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Melandjutkan penglaksanaan fatsal 27 ajat 2 dan fatsal 33 Undang-undang Dasar Republik serta menjelenggarakan politik buruh dan tani berpedoman pada fatsal-fatsal tersebut.
3. Mendemokratisir kehidupan politik dan pemerintahan, antara lain dengan djalan:
   a. mengusahakan selekas mungkin berlakunja hak-hak bebas demokrasi, terutama hak berserikat dan bersidang dan hak menjatakan pendapat.
   b. Melaksanakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah.
   c. Sebelum pemilihan umum berhatsil dimana perlu memperbaharui susunan Dewan-dewan Perwakilan Daerah jang sedapat mungkin mentjerminkan perkembangan kehidupan politik.
4. Menjelenggarakan pemilihan tenaga-tenaga bekas anggauta tentara maupun lasjkar kembali kemasjarakat serta rehabilitasi kurban-kurban perdjuangan.
5. Memadjukan pembangunan budi disegala lapisan masjarakat dan mendjamin kebebasan suburnja djiwa keagamaan menurut agama masing-masing didalam pembangunan negara, sesuai U.U.D. pasal 29.
6. Memperluas pendidikan masjarakat dan pengadjaran Rakjat.

Kabinet ke-10b (20 Desember 1949 — 6 September 1950):

1. Menjelenggarakan supaja pemindahan kekuasaan ketangan bangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan saksama;

   mengusahakan reorganisasi K.N.I.L. dan pembentukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentara Belanda kenegerinja dalam waktu jang selekas-lekasnja.
2. Menjelenggarakan ketenteraman umum, supaja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja terdjamin berlakunja hak-hak demokrasi dan terlaksananja dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannja.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, tjara bagaimana rakjat menjatakan kemauannja menurut azas-azas Undang-undang Dasar R.I.S. dan menjelenggarakan Pemilihan Umum untuk Konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwudjud kepada kemakmuran rakjat seluruhnja.

5. Menjempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masjarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudajaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat.
6. Menjelesaikan soal Irian dalam setahun ini djuga dengan djalan damai.
7. Mendjalankan politik luar negeri jang memperkuat kedudukan R.I.S. dalam dunia internasional dengan memperkuat tjita-tjita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa.

   Memperkuat perhubungan moreel, politik dan ekonomi antara negara-negara Asia Tenggara.

   Mendjalankan politik dalam Uni, agar supaja Uni ini berguna bagi kepentingan R.I.S.

   Berusaha supaja R.I.S. mendjadi anggauta Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kabinet ke-11 (6 September 1950 — 27 April 1951):

1. Mempersiapkan dan menjelenggarakan pemilihan umum, untuk Konstituante dalam waktu jang singkat.
2. Mentjapai konsolidasi dan menjempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan Negara jang bulat (Fatsal 146 U.U.D.).
3. Menggiatkan usaha mentjapai keamanan dan ketenteraman.
4. Memperkembang dan memperkokoh kekuatan ekonomi Rakjat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi Nasional jang sehat. Melakukan keragaman antara buruh dan madjikan.
5. Membantu pembangunan perumahan Rakjat serta memperluas usaha-usaha meninggikan deradjat kesehatan dan ketjerdasan rakjat.
6. Menjempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas Anggauta-anggauta Tentara dan Gerilja kedalam masjarakat.
7. Memperdjuangkan penjelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini.

Kabinet ke-12 (27 April 1951 — 3 April 1952):

1. Mendjalankan tindakan-tindakan jang tegas sebagai negara hukum untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman.
   Menjempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
2. Membuat dan melaksanakan rentjana kemakmuran nasional dalam djangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakjat. Membaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani.
   Mempertjepat usaha penempatan bekas pedjuang dalam lapangan pembangunan.
3. Menjelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menjelenggarakan pemilihan umum itu dalam waktu jang singkat. Mempertjepat terlaksananja otonomi daerah.
4. Menjiapkan Undang-undang tentang:
   a. Pengakuan Serikat Buruh.
   b. Perdjandjian kerdja sama (collectieve arbeidsovereenkomst).
   c. Penetapan upah minimum.
   d. Penjelesaian Pertikaian perburuhan.

5. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan aktief dan jang menudju perdamaian. Menjelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unie-Statuut mendjadi hubungan berdasarkan perdjandjian internasional blasa. Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain persetudjuan hasil K.M.B. dan meniadakan perdjandjian-perdjandjian jang njata merugikan rakjat dan Negara.
6. Memasukkan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

Kabinet ke-13 (3 April 1952 — 30 Djuli 1953):

1. *Organisasi Negara:*
   a. Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah.
   b. Menjelesaikan penjelenggaraan dan mengisi otonomi Daerah.
   c. Menjederhanakan organisasi Pemerintah Pusat.
2. *Kemakmuran:*
   a. Memadjukan tingkat penghidupan rakjat dengan mempertinggi produksi Nasional, terutama bahan makanan rakjat.
   b. Melandjutkan usaha perobahan agraria.
3. *Keamanan:*
   Mendjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebidjaksanaan sebagai negara hukum dan menjempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masjarakat untuk mendjamin keamanan dan ketenteraman.
4. *Perburuhan:*
   Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggalkan deradjatnja kaum buruh guna mendjamin proces produksi Nasional.
5. *Pendidikan dan Pengadjaran:*
   Mempertjepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengadjaran.
6. *LuarNegeri:*
   a. Mengisi politik luar negeri jang bebas dengan activiteit jang sesuai dengan kewadjiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan Nasional menudju perdamaian dunia.
   b. Menjelesaikan penjelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar Uniestatuut mendjadi hubungan berdasarkan perdjandjian Internasional biasa jang menghilangkan hasil-hasil K.M.B. jang merugikan rakjat dan Negara.
   c. Meneruskan perdjuangan memasukkan Irian-Barat dalam wilajah Indonesia setjepatnja.

Kabinet ke-14 (1 Agustus 1953 sampai 12 Agustus 1955).

I. Dalam Negeri.

1. *Keamanan.*
   a. Memperbaharui politik mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan jang tegas serta membangkitkan tenaga rakjat.
   b. Menjempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan Negara.

2.. *Pemilihan Umum.*

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat.

3.. *Kemakmuran dan Keuangan.*

a. Menitik beratkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakjat djelata.

b. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakjat kota.

c. Mempertjepat usaha penempatan bekas pedjuang dan kaum pengangur terlantar dalam lapangan pembangunan.

d. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang Negara.

4. *Organisasi Negara.*

a. Memperbaharui politik desentralisasi dengan djalan menjempurnakan perundang-undangannja dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ketingkat jang paling bawah.

b. Menjusun aparatuur pemerintahan jang effisien serta pembagian tenaga jang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai.

c. Memberantas korupsi dan birokrasi.

5. *Perburuhan.*

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mentjapai kegembiraan kerdja sebesar-besarnja.

6. *Perundang-undangan.*

Mempertjepat terbentuknja perundang-undangan nasional. terutama dilanpangan keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan.

II. Irian Barat.

Mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

III. Politik Luar Negeri.

a. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan jang menudju perdamaian dunia.

b. Merobah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuut Uni mendjadi hubungan internasional biasa.

c. Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan Negara.

IV. Kebidjaksanaan Pemerintah.

Mengusahakan penjelesaian segala perselisihan politik jang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menjerahkan keputusannja kepada Parlemen.

Kabinet ke 15 (12 Agustus 1955 sampai kini).

1. Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah, i.c. kepertjajaan Angkatan Darat dan Masjarakat kepada Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rentjana jang sudah ditetapkan dan menjegerakan terbentuknja Parlemen jang baru
3. Menjelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnja dalam tahun 1955 ini djuga.
4. Menghilangkan faktor-faktor jang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas Korupsi.
6. Meneruskan perdjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik kerdja-sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menudju perdamaian.

DAFTAR NAMA-NAMA PARA MENTERI

(Angka2 jang dikurung dibelakang nama menundjukkan nomer-nomer Kabinet dimana mereka pernah duduk)

A

1. Abdul Hakim (10a, 15)
2. Ir. Abdulkarim (2,3)
3. Mr. Abdulmadjid Djojoadhiningrat (3,4,5,6)
4. Abdul Murad (2)
5. S.M. Abidin (14)
6. Abikusno Tjokrosujoso (1,14)
7. Dr. Abu Hanifah (10b)
8. H. Agus Salim (3,4,5,6,7,8)
9. Anak Agung Gde Agung (10b, 15)
10. Mr. Ali Sastroamidjojo (5,6,7,14)
11. Dr. Amir (1)
12. Mr. Amir Sjarifuddin (1,2,3,4,5,6)
13. H. Anwarruddin (5)
14. Anwar Tjokroaminoto (6,13)
15. Arudji Kartawinata (3,5,6)
16. Asrarudin (15)
17. Mr. Assaät (11)

B

18. Dr. Bahder Djohan (11,13)
19. A.R. Baswedan (4)
20. Mr. Burhanudin Harahap (15)
21. Dr. Buntaran Martoatmodjo (1)

C

22. Drs. Coomala Noor (15)

D

23. Dr. Darmasetiawan (2,3,4)
24. Ir. Darmawan Mangunkusumo (2,3)
25. K.H. Dewantoro (1)
26. Djanuismadi (15)
27. Mr. Djody Gondokusumo (14)
28. Ir. Djuanda (2.3.4.5.6.7,8,10b.11.12 13)

E

29. Moh. Enoch (5)

F

30. H. Fakih Usman (10a, 13)
31. H. Faturrahman (4)

G

32. Dr. A.K. Gani (4,5,6,14)
33. Mr. Gondokusumo (12)
34. Ir. Gunarso (4)
35. Mr. Gunawan (15)

H

36. Mr. Hadi (3,4)
37. Dr. A. Halim (10a, 11)
38. Hamdani (10a)
39. Sultan Hamengku Buwono IX (4,5,6,7,8,10b,11,13)
40. Sultan Hamid II (10b)
41. Moh. Hanafiah (14)
42. Harjadi (11)
43. Harsono Tjokroaminoto (4,11,15)
44. Mr. T. Moh. Hasan (7a)
45. Moh. Hassan (14)
46. Drs. Moh. Hatta (7,8,10b)
47. Prof. Mr. Hazairin (14)
48. Mr. Hindromartono (5,6)

I

49. K.H. Iljas (15)
50. Ir. Indratjaja (7a)
51. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo (12,14)
52. Mr. Iwa Kusuma Sumantri (1,14)

J

53. Prof. Ir. Johannes (11)
54. Mr. Jusuf Wibisono (4,12)

K

55. I.J. Kasimo (5,6,7,7a,8,9,15)
56. Mr. Kasman Singodimedjo (6)
57. Mr. Kosasih Purwanegara (10b)
58. Kusnan (7,8,9)

L

59. F. Laoh (15)
60. Ir. H. Laoh (3,4,5,6,8,10b)
61. Dr. J. Leimena (3,4,5,6,7,8,10b,11, 12,13,15)
62. Dr. Lie Kiat Teng (14)
63. Mr. Lukman Hakim (4,7a,8,9,10a)
64. Mr. Lukman Wiriadinata (13,15)

M

65. Dr. Maäs (10a)
66. S. Mangunsarkoro (8,9,10a)
67. Mr. Tandiono Manu (10a,11)
68. Mr. A.A. Maramis (1,5,6,7,7a)
69. Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso (3,4)
70. Drs. Maruto Darusman (5,6)
71. Drs. K.H. Masjkur (6,7,7a,8,9,14)
72. A. Mononutu (10b,12,13)
73. Mukarto (13)
74. Dr. Mr. T.S.G. Mulia (2,3)

N

75. Mr. Moh. Nasrun (12)
76. Moh. Natsir (2,3,4,7,11)

O

77. Dr. Ong Eng Die (5,6,14)
78. Oto Iskandar Dinata (1)

P

79. M.A. Pellaupessy (11,12)
80. Prawoto Mangkusasmito (13)
81. Mr. A.G. Pringgodigdo (10a)
82. Ir. Putuhena (2,3,4)

R

83. I. Gusti Gde Raké (14)
84. Ir. Rasad (3)
85. Mr. St. Rasjid (7a)
86. H. Rasjidi (2,3)
87. Prof. Ir. Roosseno (14)
88. Mr. Moh. Rum (4,6,10b,11,13)

S

89. Sadjarwo (10a, 14)
90. Ir. Saksono (3)
91. Dr. Samsi (1)
92. Mr. Samsuddin (6,8,9)
93. Dr. Samsuddin (12)
94. Moh. Sardjan (13,15)
95. Mr. Sartono (1)
96. Dr. Satrio (5,6)

S

97. Dr. D.D. Setiabuddhy (4)
98. Ir. Setiadi (5,6)
99. Setiadjid (4,5,6)
100. Sekawa (12)
101. Siauw Giok Tjhan (5,6)
102. Siradjuddin Abbas (14)
103. Ir. Sitompul)7a, 10a)
104. Mr. Sjafruddin Prawiranegara (13, 4,7,7a,8,10b,11)
105. Sjahbuddin Latif (5,6)
106. Sjamsuddin St. Makmur (15)
107. St. Sjahrir (2,3,4)
108. Mr. A. Subardjo (1,12)
109. Dr. Sudarsono (2,3,4)
110. Sudibjo (14,15)
111. Sugondo Djojopuspito (10a)
112. Dujas (5,6)
113. Mr. Sujono Hadinoto (12)
114. Dr. Sukiman Wirjosandjojo (7,8, 12)
115. Sukoso Wirjosaputro (5,6)
116. Sulyodikusumo (1)
117. Mr. Sumanang (13)
118. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (11,13,15)
119. Mr. Sunario (14)
120. Mr. Sunario Kolopaking (2)
121. Mr. Sunarjo (14,15)
122. Dr. Suparmo (10b)
123. Supeno (7)
124. Prof. Mr. Supomo (1,10b)
125. Suprodjo (5,6)
126. Ir. Surachman Tjokroadisurjo (1. 2,3)
127. Dr. Surono (8)
128. Suroso (7a,11,12,13,14,15)
129. Mr. Susanto Tirtoprodjo (4,5,6, 7,7a,8,9,10a)
130. Sutomo al. Bung Tomo (15)
131. Dr. Sutopo (10a)
132. Mr. Suwandi (2,3,4)
133. Prof. Ir. Suwandi (15)
134. Ir. Suwarto (12,13)
135. Suwirjo (12)

T

136. Mr. Tamzil (5,6)
137. Mr. Tan Po Goan (4)
138. I. Tedjasukmana (12,13,15)
139. Dr. A. Tjokronegoro (5,6)
140. Dr. F.L. Tobing (14)
141. Nj. S.K. Trimurty (5,6)

U

142. Ir. Ukar Bratakusumah (12)

W

143. K.H. Wachid Hasjim (1,4,10b,11, 12)
144. Wijono (4)
145. Wikana (3,4,5,6)
146. Mr. Wilopo (5,6,10b,12,13)
147. Wiranatakusumah (1)

W

148. Wiwoho Purbohadidjojo (10a)
149. Wondoamiseno (5,6)
150. Mr. Wongsonegoro (8,11,12,14)

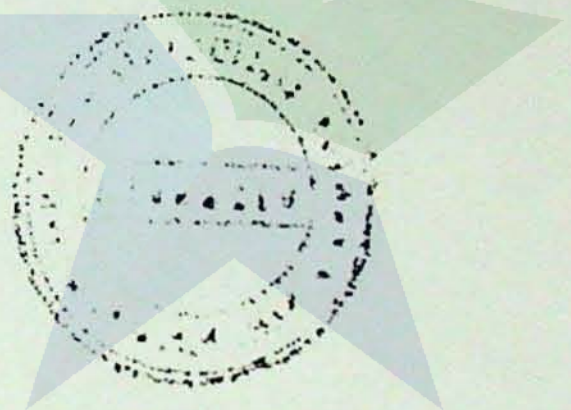
Y

151. Mr. Muh. Yamin (12,14)

Z

152. Zainul Arifin (14)

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
* KEM. P.P. & K. *



PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 850/B—'55

PERPUSTAKA
2

II. ICHTISAR PEMBAGIAN TEMPAT DALAM KABINET-KABINET MENURUT PARTAI

Partai	Kabinet ke 2		Kabinet ke 3		Kabinet ke 4		Kabinet ke 5		Kabinet ke 6		Kabinet ke 7		Kabinet ke 8		Kabinet ke 10a		Kabinet ke 10b		Kabinet ke 11		Kabinet ke 12		Kabinet ke 13		Kabinet ke 14		Kabinet ke 15	
	Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah		Djumlah	
	djab.[1]	or.[1]	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djba.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.	djab.	or.
1. Masjumi	1 (2)[2]	1 (2)	4 (4)	4 (4)	7 (7)	7 (7)	—	—	5 (0)	5 (0)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	3 (3)	3 (3)	4 (3)	4 (3)	4 (5)	4 (4)	6(5)*)	5(5)*)	4 (4)	4 (4)	—	—	4 (4)	3 (3)
2. Nahdatul 'Ulama	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 (3)	3 (3)	2 (2)	2 (2)
3. P.S.I.I.	—	—	—	—	—	—	4 (5)	4 (5)	4 (4)	4 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (0)	1 (0)	—	—	1 (0)	1 (0)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
4. P.E.R.T.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 (1)	0 (1)	—	—
5. P.K.R.I. (Partai Katholik)	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	1 (1)	1 (1)
6. Parkindo	2 (2)	2 (2)	3 (3)	3 (3)	2 (2)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	1 (1)	1 (1)
7. P.N.I.	—	—	1 (1)	1 (1)	4 (4)	4 (4)	7 (7)	6 (6)	7 (7)	6 (6)	3 (4)	3 (4)	5 (5)	4 (4)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	3 (3)	—	—	5 (5)	5 (5)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	—	—
8. P.R.N.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (2)	1 (2)	2 (2)	2 (2)
9. Perwari dan P.P.I.	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. P.I.R.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	2 (2)	2 (2)	1(2)*)	1(2)*)	—	—	3 (1)	3 (1)	3 (3)	3 (3)
11. Parindra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
12. S.K.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 (2)	1 (1)	—	—
13. Demokrat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)
14. Badan Kongres Pemuda	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Partai Sosialis	7 (5)	4 (3)	6 (6)	5 (5)	6 (6)	5 (5)	7 (7)	6 (6)	7 (7)	6 (6)	1 (0)	1 (0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Partai Sosialis Indonesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 (3)	3 (3)	—	—	2 (2)	2 (2)	—	—	2 (2)	2 (2)	—	—	2 (2)	2 (2)
17. Partai Buruh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)
18. B.T.I.	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	—	—
19. P.G.R.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. P.B.I.	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Pers. Progressif	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (0)	1 (0)	—	—
22. P.K.I.	—	—	—	—	—	—	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Tak berpartai	6 (7)	6 (7)	9 (7)	9 (7)	8 (9)	8 (9)	6 (5)	6 (5)	5 (5)	5 (5)	6 (4)	4 (4)	5 (4)	5 (4)	2 (2)	2 (2)	9 (8)	8 (7)	5 (4)	5 (4)	2 (2)	2 (2)	3(2)**)	3 (2)	1 (1)	1 (1)	—	—

[1]) djab. = djabatan jang disediakan; or. = orang jang mendudukinja.

[2]) Angka dikurung sebelah kanan menjatakan djumlah sesudah ada perubahan (mutasi) dalam Kabinet itu (keadaan pada waktu Kabinet bubar).

*) Karena pengangkatan Sdr. Sewaka baru pada tanggal 14 Mei 1951, maka sebelum itu djabatan Menteri Pertahanan dioegang oleh Masjumi (P.M.), sehingga pada permulaan P.I.R. hanja memegang 1 djabatan dengan 1 orang dan Masjumi 6 djabatan dengan 5 orang. Pada tanggal 14 Mei tersebut, P.I.R. mendjadi memegang 2 djabatan, Masjumi 5 djabatan masing-masing dengan 2 orang dan 5 orang. Pada pengangkatan Menteri Urusan Agraria tanggal 20 Nopember 1951, P.I.R. mendjadi memegang 3 djabatan dengan 3 orang, kemudian pada sa'at meninggalnja Menteri Urusan Agraria pada tanggal 6 Maret 1952, kembali hanja memegang 2 djabatan dengan 2 orang. Djadi waktu Kabinet bubar P.I.R. memegang 2 djabatan dengan 2 orang.

**) Waktu Menteri Pertahanan berhenti, tidak diganti akan tetapi djabatan Menteri pertahanan a.i. dibebankan kepada Perdana Menteri.

III. ICHTISAR PEMBAGIAN PIMPINAN KEMENTERIAN DALAM KABINET-KABINET MENURUT PARTAI

(menurut penetapan sesungguhnja, djadi tidak dengan mereka jang menolak angkatannja).

Djabatan	Kabinet 2	Kabinet 3	Kabinet 4	Kabinet 5	Kabinet 6	Kabinet 7	Kabinet 8	Kabinet 10a	Kabinet 10b	Kabinet 11	Kabinet 12	Kabinet 13	Kabinet 14	Kabinet ke 15
1. Perdana Menteri	P. Sosialis	P. Sosialis	P. Sosialis	P. Sosialis	P. Sosialis	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	Masjumi	Masjumi	P.N.I.	P.N.I.	Masjumi
2. Wakil Perdana Menteri (I)	—	—	—	P.N.I.	Masjumi	—	Masjumi	Masjumi	—	tak berpartai	P.N.I.	Masjumi	P.I.R. (meletakkan djabatan).	P.I.R.
3. „ „ „ (II)	—	—	—	P.B.I.	P.S.I.I.	—	—	—	—	—	—	—	N.U.	P.S.I.I.
4. „ „ „ (III)	—	—	—	—	P.B.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. „ „ „ (IV)	—	—	—	—	P.N.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Menteri Luar Negeri	P. Sosialis	P. Sosialis	P. Sosialis	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	—	tak berpartai	Masjumi	Masjumi	P.N.I.	P.N.I.	Demokrat
7. „ „ „ Muda	—	tak berpartai	tak berpartai	P. Sosialis	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. „ Dalam Negeri	P. Sosialis	P. Sosialis	Masjumi	P.S.I.I.	Masjumi	Masjumi	P.I.R.	P.N.I.	tak berpartai	tak berpartai	P.N.I.	Masjumi	P.I.R. diganti N.U.	N.U.
9. (Wk.) Menteri Dalam Negeri Muda	tak berpartai	—	B.T.I.	P. Sosialis	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Menteri Keamanan Rakjat	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Wk. Menteri Keamanan Rakjat	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Menteri Pertahanan	—	P. Sosialis	P. Sosialis	P. Sosialis	P. Sosialis	tak berpartai	tak berpartai	—	tak berpartai	tak berpartai	P.I.R.	tak berpartai	Pers. Progressif	Masjumi
13. „ „ Muda	—	Masjumi	Masjumi	P.S.I.I.	P.S.I.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. „ Kehakiman	tak berpartai	tak berpartai	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	tak berpartai	tak berpartai	P.I.R.	tak berpartai	P.S.I.	P.R.N.	P.S.I.
15. „ „ Muda	—	tak berpartai	tak berpartai	—	Masjumi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. „ Penerangan	P. Sosialis	Masjumi	Masjumi	P. Sosialis	P.S.I.I.	Masjumi	Masjumi	P.N.I.	—	Demokrat	P.N.I.	P.N.I.	S.K.I.	P.I.R.
17. „ „ Muda	—	—	tak berpartai	P.S.I.I.	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. „ Keuangan	tak berpartai	tak berpartai	Masjumi	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	Masjumi	Masjumi	Masjumi	Masjumi	P.S.I.	P.N.I.	P.S.I.
19. Menteri Keuangan Muda	—	Masjumi	P.N.I.	tak berpartai	tak berpartai	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. „ Persediaan Makanan	—	—	—	—	—	P.K.R.I.	—	—	—	—	—	—	—	—
21. „ „ „ Rakjat	—	—	—	—	—	—	P.K.R.I.	—	—	—	—	—	—	—
22. „ Kemakmuran	tak berpartai	—	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	Masjumi	P.K.R.I.	—	tak berpartai	—	—	—	—	—
23. „ „ Muda I	—	—	Masjumi	P.K.R.I.	P.K.R.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. „ „ „ II	—	—	—	P. Sosialis	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. „ Pertanian dan Persediaan	—	tak berpartai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. „ „ „ „ Muda	—	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. „ Pertanian	—	—	—	—	—	—	—	B.T.I.	—	P.S.I.	P.K.R.I.	Masjumi	B.T.I.	Masjumi
28. „ Perdagangan dan Perindustrian (Menteri Perekonomian)	—	tak berpartai	—	—	—	—	—	P.S.I.	—	P.S.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I. diganti P.I.R.	P.K.R.I.
29. Menteri Perhubungan	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	P.N.I.	—	—	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	P.S.I.I. diganti P.N.I.	P.R.N.
30. „ „ Muda	—	tak berpartai	P.B.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P. Buruh
31. „ Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum	—	—	—	—	—	—	—	Parkindo	P.N.I.	P.I.R.	P.N.I.	P.K.R.I.	P.I.R. diganti P.S.I.I.	Parindra
32. „ Pekerdjaan Umum (dan Tenaga)	Parkindo	Parkindo	Parkindo	tak berpartai diganti P.N.I.	P.N.I.	P.N.I. 1)	P.N.I.	—	—					

1) Baru kemudian diangkat: sebelumnja seorang tak berpartai Menteri a.i.

Djabatan	Kabinet 2	Kabinet 3	Kabinet 4	Kabinet 5	Kabinet 6	Kabinet 7	Kabinet 8	Kabinet 10a	Kabinet 10b	Kabinet 11	Kabinet 12	Kabinet 13	Kabinet 14	Kabinet 15
33 Menteri Pekerdjaan Umum (dan Tenaga) Muda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34 - Perburuhan	—	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I. [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 - - Muda	—	—	—	P.B.I.	P.B.I.	—	—	P. Buruh	P.N.I.	Parindra	P. Buruh	P. Buruh	P. Buruh	P. Buruh
36 - Perburuhan dan Sosial	—	—	—	P.N.I.	P.N.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 - Sosial	—	—	—	—	—	P.G.R.I.	P.G.R.I.	—	—	—	—	—	—	—
	P. Sosialis	Perwari dan P.P.I.	Perwari dan P.P.I.	P.B.I.	P.B.I.	—	—	P.S.I.	tak berpartai	P. Katholik	Masjumi	P.S.I.I. diganti Parindra	Parindra	P.S.I.I.
38 - Sosial Muda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 - Pembangunan dan Pemuda	—	P. Sosialis	P. Sosialis	P.S.I.I.	P.S.I.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 - Pembangunan Masjarakat	—	—	—	—	—	P.S.I.	—	—	—	—	—	—	—	—
41 - Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan	—	—	—	—	—	—	—	P.S.I.	P.S.I.	—	—	—	—	—
42 - Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Muda	Parkindo	—	tak berpartai	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	P.N.I.	Masjumi	tak berpartai	P.I.R.	tak berpartai	tak berpartai	Parindra
43 - Agama	—	Parkindo	tak berpartai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 - Kesehatan	—	Masjumi	Masjumi	P.S.I.I. [2]	Masjumi	Masjumi	Masjumi	Masjumi	Masjumi	Masjumi	Masjumi	Masjumi	N.U.	N.U.
	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	Parkindo	Parkindo	Parkindo	tak berpartai diganti Parkindo	P.I.R.	Parkindo	Parkindo	Parkindo	Parkindo	S.K.I. diganti P.S.I.I.	Parkindo
45 - Kesehatan Muda	—	Parkindo	Parkindo	P.B.I.	P.B.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 - Negara	Masjumi	B. K. Pemuda	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	tak berpartai	Parkindo	—	tak berpartai	P.S.I.I.	—	—	—	Masjumi
47 - -	—	—	Masjumi	B. K. Pemuda	B. K. Pemuda	—	tak berpartai	—	Masjumi [4]	—	—	—	—	P.R.I.
48 - -	—	—	B. K. Pemuda	B.T.I.	B.T.I.	—	Parkindo [3]	—	tak berpartai	—	—	—	—	P.I.R.
49 - -	—	—	P. Sosialis	tak berpartai	tak berpartai	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 - -	—	—	tak berpartai	P. Sosialis	P. Sosialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 - -	—	—	—	P.K.I.	P.K.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52 - -	—	—	—	—	Masjumi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53 - -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Demokrat	—	—	—
54 - Urusan Umum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Parindra	Parindra [6]	—	—
55 - - Pegawai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P.I.R. [5]	—	N.U. diganti P.R.N.	P.R.N.
- - Agraria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
56 - Kesedjahteraan Negara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P.S.I.I. diganti PERTI	—

1) Waktu menggantikan Menteri Pekerdjaan Umum, tidak diisi lagi.
2) Baru kemudian diangkat.
3) Kemudian menggantikan Menteri Kesehatan, sedang djabatan Menteri Negara ini tidak diisi.
4) Kemudian diangkat mendjadi Komisaris Agung Indonesia di Nederland, sedang djabatan Menteri Negara ini tidak diisi.
5) Baru kemudian diadakan.
6) Kemudian ditiadakan.